

ABSTRAK

Nama : Syarifah Maula
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP SANKSI PEMBENTUKAN HUKUMAN CAMBUK PADA QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

Hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk penerapan Qanun Aceh sering kali menuai perdebatan, terutama kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum Islam sebagai landasan utama sanksi cambuk juga turut dipermasalahkan karena berbeda dengan pelaksanaan cambuk dilapangan, atas dasarini maka, permasalahan pokok yang diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah tentang bagaimana pembentukan hukuman cambuk pada Qanun Jinayat Aceh dalam tinjauan sejarah dan realitas kritis serta bagaimana hukum pidana dan hukum Islam melandasi pembentukan hukuman cambuk dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan historis (sejarah) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahan untuk penelitian ini juga diperoleh melalui kajian pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya proses pembentukan hukum cambuk pada Qanun Aceh melalui dua tahapan: *pertama*, pada aspek historis yaitu perjuangan DI/TII yang dianggap belum selesai memperjuangkan syari'at Islam sehingga Gerakan Aceh Merdeka melakukan penyempuraan atas DI/TII sampai tpada erbentuknya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Kedua*, pada aspek yuridisnya, setelah melkukan kajian kritis Qanun Aceh sering bertolak dengan Hak Asasi Manusia dan diasumsikan tidak sesuai syari'at Islam “yang sebenarnya”. Pada akhirnya dengan membenarkan posisi yuridisnya melalui analisis kritis yang berpijak pada teori pluralisme hukum. Dengan kata lain, keberadaan hukum cambuk dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 itu sudah benar adanya.

Dalam menerapkan hukuman cambuk di Aceh, penegak hukum harus berpedoman pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan memastikan pelaksanaan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan norma agama dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pelaksanaan hukuman cambuk harus mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga penerapannya dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam proses penegakan hukum, penting juga untuk memperhatikan kondisi pelaku dan dampak sosial dari pelaksanaan hukuman, sehingga nilai keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Cambuk, Qanun Aceh, Hukum Islam, dan HAM

ABSTARCT

Name : Syarifah Maula
Study Program : Bachelor Of Law
Title : **CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP
SANKSI PEMBENTUKAN HUKUMAN CAMBUK PADA QANUN ACEH
NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

The caning punishment as a form of implementation of the Aceh Qanun often reaps debate, especially in relation to Human Rights (HAM). Islamic law as the main basis for caning sanctions is also a problem because it is different from the implementation of caning in the field, on this basis, the main problem raised in writing this research is about how the formation of caning punishment in the Aceh Qanun Jinayat in a review of history and critical reality and how criminal law and Islamic law underlie the formation of caning punishment in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat.

The research method used is a normative legal research method with a historical approach and a comparative approach which is carried out by comparing existing laws and regulations. Materials for this research were also obtained through literature review, including laws and regulations, legal documents, and other supporting literature.

The results of the study show that at least the process of forming the caning law in the Aceh Qanun went through two stages: first, in the historical aspect, namely the struggle of DI/TII which was considered unfinished in fighting for Islamic law so that the Free Aceh Movement perfected DI/TII until the formation of Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Second, in the legal aspect, after conducting a critical study of the Aceh Qanun, it often departs from Human Rights and is assumed to be inconsistent with the "true" Islamic law. In the end, by justifying its legal position through a critical analysis based on the theory of legal pluralism. In other words, the existence of the caning law in Aceh Qanun No. 6 of 2014 is true.

In implementing the whipping penalty in Aceh, law enforcement must be guided by Qanun Aceh No. 6 of 2014 and ensure the implementation of punishment in accordance with the provisions of Islamic law. This aims to create a balance between the enforcement of religious norms and the protection of human values. In addition, the implementation of the whipping punishment must consider the socio-cultural aspects of the Acehnese community, so that its application can be accepted by the wider community. In the process of law enforcement, it is also important to pay attention to the condition of the perpetrator and the social impact of the implementation of the punishment, so that the value of justice can be realized for all parties involved.

Keywords: Whipping Punishment, Qanun Jinayat, Islamic Law, Human Rights, Aceh